BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menjadi dasar hukum bagi Peratun untuk memeriksa penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Untuk dapat melaksanakan isi Pasal 21 UUAP, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Mengenai objek permohonannya disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015, namun dalam Perma tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek permohonan pengujian di PTUN, hanya menggunakan istilah kata “setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah” yang menimbulkan multiftafsir. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan istilah tersebut bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang mana bahwa kata tersebut menyebabkan banyak interpretasi dalam pelaksanaannya.
2. Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim PTUN Medan dalam putusan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN adalah tidak tepat karena Hakim PTUN Medan dalam pertimbangannya menggunakan

dasar pengujian penyalahgunaan wewenang seharusnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN, bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut diatas tidak ada kepastian hukum. Adapun makna dari kepastian hukum yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Keterbatasan dalam pengaturan objek permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang di PTUN menimbulkan keambiguan dalam pelaksanaannya, perlunya kejelasan dalam pengaturan terkait hal tersebut terutama seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015, dalam Perma tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek permohonan pengujian di PTUN, hanya menggunakan istilah kata yang menimbulkan multitafsir tersebut agar tidak ada permasalahan dikemudian harinya.
2. Sebagai dasar pengujian penyalahgunaan wewenang seharusnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN, bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan adanya kepastian hukum yang artinya jelas dan tidak menimbulkan multitafsir